

EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS DANA KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG

Riswan Setyo Kardinto¹, Ayuning Budiati², Titi Stiawati³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Email: riswansetyo@gmail.com

Abstrak

Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah lokal dalam pencegahan stunting melalui pemanfaatan sumber daya publik di tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang serta menganalisis tata kelola program dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik pelaksanaan program dalam konteks administrasi publik di tingkat lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan secara administratif melalui kelas Pos Gizi selama 28 hari dengan sasaran balita underweight, wasting, dan berat badan tidak naik. Namun, secara substantif pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan data sasaran, variasi pelaksanaan antar kelurahan, kendala komitmen orang tua, dan kebutuhan pemantauan lanjutan. Tata kelola program telah memiliki pembagian peran dan mekanisme pelaksanaan, tetapi masih perlu diperkuat pada transparansi data, akuntabilitas mutu makanan, pengawasan penyedia, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi program.

Kata Kunci: Administrasi Publik, Evaluasi Program, Dana Kelurahan, Pemberian Makanan Tambahan, Stunting.

Abstract

The supplementary feeding program funded by kelurahan funds is one form of local government intervention in preventing stunting through the use of public resources at the kelurahan level. This study aims to evaluate the implementation of the supplementary feeding program funded by kelurahan funds in Cibodas District, Tangerang City, and to analyze its governance and contribution to community empowerment. This research employed a descriptive qualitative approach to understand program implementation practices within the context of public administration at the local level. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation studies involving informants directly engaged in program implementation. The findings show that the program has been administratively implemented through a 28-day Pos Gizi class targeting toddlers categorized as underweight, wasting, and showing no weight gain. However, substantively, the program implementation has not been fully optimal due to differences in target data, variations in implementation across kelurahan, parents' commitment constraints, and the need for follow-up monitoring. The program governance has established role distribution and implementation mechanisms, but still needs strengthening in data transparency, food quality accountability, provider supervision, and community involvement in program evaluation.

Keywords: *Public Administration, Program Evaluation, Kelurahan Funds, Supplementary Feeding, Stunting.*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Berliana, 2022; Londa, 2020). Dalam konteks administrasi publik, kelurahan memiliki posisi strategis sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kelurahan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pelaksana berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal (Lawuno & Silalahi, 2021).

Salah satu isu pembangunan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah adalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (Susanti, 2022). Permasalahan stunting tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia pada masa depan (Hoddinott et al., 2013). Oleh karena itu, pencegahan stunting menjadi bagian penting dari agenda pembangunan kesehatan sekaligus pelayanan publik yang harus dikelola secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah melaksanakan berbagai intervensi untuk menurunkan risiko stunting, salah satunya melalui Program Pemberian Makanan Tambahan atau PMT. Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi balita, terutama bagi kelompok sasaran yang mengalami masalah berat badan, *underweight*, dan *wasting*. Di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Program PMT dilaksanakan dengan dukungan dana kelurahan melalui kelas Pos Gizi selama dua sesi, yaitu 14 hari ditambah 14 hari, sehingga total pelaksanaan mencapai 28 hari berturut-turut. Sasaran program ditentukan berdasarkan data Dinas Kesehatan dan puskesmas, dengan mempertimbangkan domisili, kondisi ekonomi keluarga, kesediaan orang tua, serta komitmen mengikuti kegiatan. Namun, pelaksanaan Program PMT berbasis dana kelurahan masih menghadapi sejumlah persoalan. Hasil awal penelitian menunjukkan adanya variasi capaian antar kelurahan, perbedaan data sasaran antara Dinas Kesehatan dan puskesmas, kendala komitmen orang tua, serta kebutuhan pemantauan lanjutan bagi balita yang belum mencapai indikator keberhasilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program PMT tidak cukup hanya dilihat sebagai kegiatan pemberian makanan tambahan, tetapi perlu dievaluasi sebagai program publik yang berkaitan dengan tata kelola anggaran, koordinasi lintas aktor, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik di tingkat lokal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Paramadhita dan Suyatna menemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dapat mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat apabila dilaksanakan secara efektif (Paramadhita & Suyatna, 2022). Masihin et al. juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dapat berjalan cukup efektif apabila didukung oleh pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Masihin et al., 2021).

Kajian lain berkaitan dengan stunting menunjukkan bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi lintas sektor. Saputri menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan program inovasi untuk mempercepat penurunan stunting (Saputri, 2019). Rofita et al. menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan ibu, kader, dan remaja mengenai pencegahan stunting (Rofita et al., 2023). Supriyadi et al. juga menunjukkan bahwa kebijakan dana desa dapat mendukung

intervensi penurunan stunting secara terintegrasi, baik melalui intervensi gizi spesifik maupun sensitif (Supriyadi et al., 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai dana desa/kelurahan, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan stunting telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang secara khusus mengevaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan dalam perspektif administrasi publik masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menekankan tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan program, tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*, dan kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi Program PMT berbasis dana kelurahan dalam perspektif administrasi publik. Dana kelurahan sebagai bagian dari sumber daya publik harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan responsif sesuai prinsip *good governance* (Mardiasmo, 2021). Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program telah berjalan sesuai tujuan, bagaimana pembagian peran antar pelaksana, serta bagaimana kontribusi program terhadap masyarakat penerima manfaat. Evaluasi kebijakan publik juga penting sebagai dasar perbaikan program agar penggunaan sumber daya publik dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Dunn, 2018; Agustino, 2020).

Selain itu, penelitian ini penting karena kajian mengenai PMT sering kali lebih banyak ditempatkan dalam perspektif kesehatan, sementara aspek administrasi publik, tata kelola dana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat masih belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya ditentukan oleh pemberian makanan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antara kelurahan, puskesmas, kader, Pokmas, penyedia makanan, dan orang tua balita. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi dalam melihat bagaimana program kesehatan masyarakat dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan publik di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan dalam pencegahan stunting di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program, menganalisis tata kelola program berdasarkan prinsip *good governance*, serta menganalisis kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat. Kontribusi penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang evaluasi program, tata kelola dana publik, dan pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan pelaksana program dalam memperbaiki ketepatan sasaran, pengawasan mutu, koordinasi, serta keberlanjutan Program PMT sebagai upaya pencegahan stunting di tingkat lokal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Evaluasi Program dalam Administrasi Publik

Evaluasi program merupakan bagian penting dalam kajian administrasi publik karena berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menelaah proses pelaksanaan, penggunaan sumber daya, hambatan implementasi, serta manfaat program bagi masyarakat. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan analisis pasca-implementasi yang mencakup penilaian terhadap proses dan hasil kebijakan (Dunn, 2018). Agustino juga menegaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk mengetahui kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan (Agustino, 2020).

Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan menjadi penting karena program tersebut menggunakan sumber daya publik dan menasar kelompok

masyarakat rentan. Penilaian terhadap program ini tidak cukup hanya dilihat dari tersalurnya makanan tambahan kepada balita, tetapi juga perlu melihat ketepatan sasaran, mekanisme pelaksanaan, koordinasi antaraktor, pengawasan, dan tindak lanjut terhadap balita yang belum mencapai indikator keberhasilan. Oleh karena itu, evaluasi program dalam penelitian ini digunakan untuk memahami pelaksanaan PMT berbasis dana kelurahan sebagai bagian dari kebijakan publik di tingkat lokal.

2. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Kelurahan

Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Mardiasmo menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2021). Prinsip ini relevan digunakan untuk menilai program yang bersumber dari dana kelurahan karena dana tersebut merupakan bagian dari keuangan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan membutuhkan tata kelola yang baik agar pelaksanaannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Transparansi diperlukan dalam penyampaian informasi mengenai sasaran, anggaran, pelaksana, dan mekanisme kegiatan. Akuntabilitas diperlukan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan mutu makanan tambahan. Partisipasi diperlukan melalui keterlibatan Pokmas, kader posyandu, dan orang tua balita. Efektivitas diperlukan agar program benar-benar mendukung pencegahan stunting sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pemberian Makanan Tambahan dan Pencegahan Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan kualitas sumber daya manusia (Susanti, 2022; Hoddinott et al., 2013). Pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, kader, maupun keluarga.

Program Pemberian Makanan Tambahan merupakan salah satu bentuk intervensi yang bertujuan memperbaiki asupan gizi balita. Pada konteks Kecamatan Cibodas, PMT berbasis dana kelurahan lebih tepat dipahami sebagai intervensi preventif karena sasaran program tidak hanya balita stunting, tetapi juga balita dengan kategori *underweight*, *wasting*, dan berat badan tidak naik. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah lokal untuk mencegah risiko stunting melalui dukungan makanan tambahan, pemantauan Pos Gizi, serta pelibatan keluarga penerima manfaat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mardikanto dan Soebianto menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan memperbaiki kualitas hidupnya (Mardikanto & Soebianto, 2015). Sulistiyani juga menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan bantuan, tetapi juga proses penguatan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan (Sulistiyani, 2017).

Program PMT berbasis dana kelurahan memiliki dimensi pemberdayaan karena melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Pokmas berperan sebagai pelaksana kegiatan, kader posyandu menjadi penghubung antara program dan keluarga sasaran,

sedangkan orang tua balita menjadi pihak yang menentukan keberlanjutan keikutsertaan anak dalam kegiatan Pos Gizi. Namun, pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap pelaksanaan teknis. Program yang ideal perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan pascaprogram.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan dalam pencegahan stunting di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Lokus penelitian meliputi enam kelurahan, yaitu Cibodas, Cibodas Baru, Cibodasari, Jatiuwung, Uwung Jaya, dan Panunggangan Barat. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, terdiri atas unsur Dinas Kesehatan, kecamatan, kelurahan, Pokmas, kader posyandu, serta orang tua balita penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek, yaitu pelaksanaan program, tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*, dan kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen program.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan fokus penelitian yang meliputi pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan, tata kelola program berdasarkan prinsip *good governance*, serta kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting. Secara umum, Program PMT berbasis dana kelurahan di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang telah dilaksanakan melalui kegiatan Pos Gizi PMT DAU Kelurahan. Program ini melibatkan beberapa aktor, yaitu kelurahan, puskesmas, ahli gizi, kelompok masyarakat atau Pokmas, kader posyandu, penyedia makanan tambahan, serta orang tua balita penerima manfaat.

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa PMT berbasis dana kelurahan tidak hanya berbentuk pemberian makanan tambahan kepada balita, tetapi juga mencakup proses pendataan sasaran, penetapan peserta, pelaksanaan kelas Pos Gizi, pemantauan pertumbuhan, serta tindak lanjut bagi balita yang belum mencapai indikator keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa program memiliki karakter sebagai intervensi pelayanan publik di tingkat lokal, karena melibatkan pengelolaan sumber daya publik, koordinasi lintas aktor, serta pelayanan langsung kepada kelompok masyarakat rentan.

Program PMT di Kecamatan Cibodas dilaksanakan melalui kelas Pos Gizi selama dua sesi, yaitu 14 hari ditambah 14 hari, sehingga total pelaksanaan mencapai 28 hari. Sasaran program adalah balita dengan kategori *underweight*, *wasting*, dan berat badan tetap atau tidak naik. Berdasarkan temuan tersebut, program ini lebih tepat dipahami sebagai intervensi preventif terhadap risiko stunting, bukan program kuratif bagi balita yang telah mengalami stunting. Dengan kata lain, PMT berbasis dana kelurahan diarahkan untuk mencegah memburuknya kondisi gizi balita sebelum berkembang menjadi masalah pertumbuhan kronis.

Penentuan sasaran program dilakukan melalui kombinasi antara data formal dan pertimbangan sosial di lapangan. Data awal berasal dari Dinas Kesehatan dan puskesmas, kemudian dipertimbangkan kembali berdasarkan domisili balita, kondisi ekonomi keluarga, kesediaan orang tua, serta komitmen keluarga untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya mengikuti data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual keluarga penerima manfaat.

Namun, pola ini juga menunjukkan adanya tantangan karena keberhasilan program sangat bergantung pada validitas data dan kesediaan keluarga untuk berpartisipasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya seragam di setiap kelurahan. Kelurahan Cibodas dan Cibodasari masing-masing memiliki 60 balita sasaran, Uwung Jaya 45 balita, sedangkan Cibodas Baru, Jatiuwung, dan Panunggangan Barat masing-masing 30 balita sasaran. Perbedaan jumlah sasaran tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan intervensi pada setiap kelurahan tidak sama. Selain itu, pola pelaksanaan juga berbeda. Panunggangan Barat, misalnya, memusatkan PMT di kelurahan, kemudian makanan tambahan diambil oleh kader dan diantarkan kepada balita. Pola ini menunjukkan adanya fleksibilitas pelaksanaan sesuai kondisi wilayah.

Fleksibilitas pelaksanaan dapat menjadi kekuatan karena kelurahan dapat menyesuaikan program dengan kondisi lokal. Namun, fleksibilitas juga dapat menjadi kelemahan apabila tidak disertai standar pengawasan yang jelas. Dalam konteks evaluasi program, keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari konsistensi mutu pelaksanaan, ketepatan sasaran, tingkat kehadiran peserta, kualitas makanan tambahan, dan keberlanjutan pemantauan setelah program selesai. Oleh karena itu, perbedaan pola antar kelurahan perlu diimbangi dengan pedoman teknis dan sistem pengawasan yang dapat diterapkan secara merata.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan jumlah data sasaran antara SK Dinas Kesehatan dan SK Puskesmas. SK Dinas Kesehatan mencatat 727 balita, sedangkan SK Puskesmas mencatat 1.167 balita. Perbedaan tersebut dapat dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, keberadaan data puskesmas menunjukkan adanya upaya memperluas cakupan pendataan agar balita yang belum tercatat tetap dapat teridentifikasi. Namun, di sisi lain, selisih data yang cukup besar menunjukkan bahwa sistem pendataan belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini menjadi persoalan penting karena program memiliki kuota terbatas, sehingga penentuan peserta harus benar-benar didasarkan pada prioritas kebutuhan.

Dalam perspektif administrasi publik, data sasaran merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan program publik. Ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, subjektivitas dalam pemilihan peserta, serta kesulitan dalam mempertanggungjawabkan keputusan program. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan (Dunn, 2018). Dalam konteks PMT berbasis dana kelurahan, kesenjangan tersebut terlihat pada belum terintegrasinya data sasaran antara Dinas Kesehatan, puskesmas, dan kelurahan. Oleh karena itu, sinkronisasi dan pemutakhiran data menjadi kebutuhan mendesak dalam perbaikan program.

Dari sisi tata kelola, Program PMT berbasis dana kelurahan telah memiliki struktur kelembagaan yang cukup jelas. Lurah berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pokmas ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan, puskesmas dan ahli gizi berperan dalam aspek teknis kesehatan, sedangkan penyedia makanan tambahan ditunjuk melalui mekanisme *e-purchasing*. Operasional Pokmas dilaksanakan melalui swakelola tipe 4. Struktur tersebut menunjukkan bahwa program telah memiliki dasar administratif, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan yang dapat ditelusuri.

Namun, tata kelola yang baik tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan struktur formal. Mardiasmo menekankan bahwa pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks PMT berbasis dana kelurahan, prinsip tersebut menuntut agar program tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga tepat sasaran, bermutu, dapat diawasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, tata kelola PMT perlu dibaca pada dua level, yaitu kepatuhan administratif dan kualitas substantif pelaksanaan program.

Pada aspek transparansi, program telah menggunakan data dari Dinas Kesehatan dan puskesmas sebagai dasar penentuan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran tidak ditentukan secara sembarangan. Namun, transparansi masih perlu diperkuat karena terdapat perbedaan data sasaran yang cukup besar antara SK Dinas Kesehatan dan SK Puskesmas. Transparansi tidak hanya berarti tersedianya data, tetapi juga data tersebut harus dapat diverifikasi, dipahami, dan digunakan secara konsisten oleh seluruh pelaksana. Apabila data yang digunakan berbeda, maka proses pemilihan peserta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi di tingkat kelurahan.

Pada aspek akuntabilitas, program telah menunjukkan pembagian tanggung jawab antara kelurahan, Pokmas, puskesmas, ahli gizi, dan penyedia makanan. Akan tetapi, akuntabilitas program tidak cukup hanya menjawab siapa pelaksana dan dari mana sumber dana. Akuntabilitas juga harus menjawab apakah makanan yang diberikan layak, apakah balita sasaran menerima PMT sesuai ketentuan, apakah pemantauan dilakukan secara konsisten, serta apakah balita yang belum mencapai indikator keberhasilan memperoleh tindak lanjut. Dengan demikian, akuntabilitas program harus bergerak dari akuntabilitas administratif menuju akuntabilitas kinerja.

Temuan mengenai adanya keluhan makanan berbau, sop berbusa, serta buah yang asam atau menjelang busuk menunjukkan bahwa pengawasan mutu makanan masih menjadi titik kritis. Meskipun keluhan tersebut telah ditindaklanjuti, masalah mutu makanan tidak dapat dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Karena makanan tambahan dikonsumsi oleh balita, kualitas PMT berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kepercayaan orang tua, dan legitimasi program. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyedia makanan perlu diperkuat melalui pemeriksaan makanan sebelum distribusi, pencatatan keluhan, mekanisme penggantian makanan, dan evaluasi berkala terhadap penyedia.

Pada aspek partisipasi, program ini telah melibatkan Pokmas, kader posyandu, dan orang tua balita. Pokmas berperan sebagai pelaksana kegiatan, kader membantu menghubungkan program dengan keluarga sasaran, sedangkan orang tua berperan melalui persetujuan dan komitmen mengikuti kelas Pos Gizi. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, bukan sekadar objek program.

Meski demikian, partisipasi masyarakat dalam program ini masih dominan pada tahap pelaksanaan teknis. Pokmas dan kader lebih banyak terlibat dalam membantu pengelompokan sasaran, komunikasi dengan orang tua, distribusi makanan, dan pendampingan kegiatan. Keterlibatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan partisipasi substantif dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut program. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, partisipasi ideal tidak hanya berupa mobilisasi masyarakat untuk menjalankan program, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengidentifikasi masalah, memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil program.

Kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat terlihat paling jelas melalui peran Pokmas dan kader posyandu. Pokmas menjadi pelaksana kegiatan di tingkat lokal, sedangkan kader menjadi penghubung antara program dan keluarga sasaran. Kader memiliki posisi strategis karena memahami kondisi sosial warga, mengetahui hambatan keluarga, serta dapat membantu menyampaikan informasi program secara lebih dekat. Pada beberapa kelurahan, kader bahkan berperan dalam pengambilan dan pengantaran PMT kepada balita. Peran ini menunjukkan bahwa kader menjadi modal sosial penting dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat.

Namun, penguatan peran kader juga perlu dilihat secara kritis. Kader sering kali memikul banyak beban teknis, mulai dari pendataan, komunikasi dengan keluarga, distribusi, pemantauan, hingga pendampingan balita. Apabila peran tersebut tidak disertai pelatihan, dukungan operasional, dan mekanisme apresiasi yang memadai, maka pemberdayaan berisiko berubah menjadi pembebanan kerja kepada masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada penguatan kapasitas Pokmas dan kader, bukan hanya pelibatan mereka sebagai tenaga pelaksana.

Keterlibatan orang tua balita juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Balita yang tercantum dalam data sasaran tidak otomatis dapat mengikuti program apabila orang tua tidak memberikan persetujuan atau tidak mampu berkomitmen mengikuti kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan PMT tidak hanya ditentukan oleh pemerintah kelurahan, puskesmas, atau penyedia makanan, tetapi juga oleh dukungan keluarga. Kendala jarak, pekerjaan, dan waktu dapat menghambat kehadiran orang tua dan balita dalam kelas Pos Gizi. Karena itu, program perlu mengembangkan pola layanan yang lebih responsif terhadap kondisi keluarga, misalnya melalui dukungan kader, penyesuaian teknis layanan, atau pemantauan pascaprogram.

Secara keseluruhan, Program PMT berbasis dana kelurahan di Kecamatan Cibodas telah berjalan secara terstruktur dan memiliki dasar tata kelola yang relatif jelas. Program ini telah memiliki sasaran, mekanisme pelaksanaan, aktor pelaksana, sumber pendanaan, dan pola tindak lanjut. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan pada sinkronisasi data sasaran, variasi pola pelaksanaan antar kelurahan, pengawasan mutu makanan, komitmen orang tua, dan belum kuatnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi program.

Dengan demikian, persoalan utama Program PMT berbasis dana kelurahan bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada kebutuhan memperkuat kualitas pelaksanaannya. Program sudah berjalan, tetapi masih perlu diarahkan agar lebih berbasis data, lebih kuat dalam pengawasan mutu, lebih akuntabel dalam tindak lanjut, dan lebih partisipatif dalam melibatkan masyarakat. Penguatan tersebut penting agar PMT berbasis dana kelurahan tidak berhenti sebagai kegiatan pemberian makanan tambahan selama 28 hari, tetapi menjadi instrumen kebijakan publik yang mendukung pencegahan stunting, tata kelola dana publik, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang telah berjalan secara terstruktur sebagai upaya pencegahan stunting. Program dilaksanakan melalui kelas Pos Gizi selama 28 hari dengan melibatkan kelurahan, puskesmas, ahli gizi, Pokmas, kader posyandu, penyedia makanan, dan orang tua balita. Sasaran program lebih diarahkan kepada balita *underweight*, *wasting*, dan berat badan tidak naik sehingga program ini bersifat preventif. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan data sasaran, variasi pelaksanaan antar kelurahan, kendala komitmen orang tua, dan kebutuhan pemantauan lanjutan. Tata kelola program telah memiliki dasar kelembagaan, mekanisme pengadaan, dan pembagian peran yang cukup jelas. Meski demikian, prinsip *good governance* masih perlu diperkuat terutama pada transparansi data, akuntabilitas mutu makanan, pengawasan penyedia, dan dokumentasi tindak lanjut. Kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat terlihat melalui pelibatan Pokmas, kader posyandu, dan orang tua balita. Namun, pemberdayaan tersebut masih dominan pada tahap pelaksanaan teknis dan belum kuat pada tahap perencanaan, pengawasan, serta evaluasi. Dengan demikian, PMT berbasis dana kelurahan perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi kegiatan pemberian makanan tambahan, tetapi juga instrumen tata kelola publik dan pemberdayaan masyarakat

dalam pencegahan stunting. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif dan lokus yang terbatas di Kecamatan Cibodas, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengukur dampak program secara kuantitatif terhadap perubahan status gizi balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berliana, I. (2022). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sistem Aplikasi E-Desk pada Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018-2021* (Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hoddinott, J., Alderman, H., Behrman, J. R., Haddad, L., & Horton, S. (2013). The economic rationale for investing in stunting reduction. *Maternal and Child Nutrition*, 9(S2). <https://doi.org/10.1111/mcn.12080>
- Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden. (2023, September 30). *Hasil Perhitungan IKPS Nasional dan Provinsi tahun 2022*. <https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/>
- Lawuno, R. K., & Silalahi, O. (2021). Hubungan antara kinerja pemerintah kelurahan dengan efektivitas program pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sosromenduran. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 5(1).
- Londa, V. Y., Laloma, S. A., & Very, Y. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 61-73.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Masihin, B. S., Suradinata, E., & Khairi, H. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2). <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.435>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Paramadhita, I. M. E. Y., & Suyatna, I. N. (2022). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Kertha Desa*, 10(4).
- Rofita, D., Marliana, Y., Anggraeni, N. P. D. A., & Hamidiyanti, Bq. Y. F. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting di Desa Kramajaya Narmada. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2). <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.15335>
- Saputri, R. A. (2019). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2). <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.947>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Supriyadi, E. I., Asih, D. B., & Sofyan, M. M. (2022). Kebijakan dana desa dalam mendukung intervensi penurunan stunting di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih. *Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung*, 2(1).
- Susanti, D. F. (2022). *Mengenal Apa Itu Stunting*. Diakses dari: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting